



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbtn.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 2861/Peng-100.KP.03.01/XI/2021
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN PERSIAPAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2021**

Sebagai tindak lanjut Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021 dan menunjuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14487/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Formasi Tahun 2021 sebagaimana terlampir;
2. Peraturan terkait kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan keikutsertaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) serta ketentuan perihal CPNS lainnya dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
3. Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta dengan keterangan "P/L" berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana dimaksud angka 1;
4. Peserta yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud angka 3, wajib memilih lokasi ujian SKB kembali melalui *login* akun SSCASN pada tanggal 15 s.d. 16 November 2021 sebagai salah satu syarat untuk mencetak kartu ujian SKB, dengan mempertimbangkan keamanan dan jarak tempuh guna meminimalisir penyebaran COVID 19 (tersedia 32 provinsi lokasi ujian sebagaimana pengumuman pertama);
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021 menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan kisi-kisi materi SKB sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dan jadwal pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian;
6. Kelalaian ...

6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
7. Bagi peserta yang diketahui telah memberikan/mengisi data yang tidak benar pada saat mendaftar, Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berhak membatalkan keikutsertaannya dalam Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021;
8. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Peserta diimbau untuk selalu memantau pengumuman yang berkaitan dengan Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada laman www.atrbpn.go.id atau <https://linktr.ee/penerimaanASNATRBPBPN>. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021 dapat disampaikan melalui WhatsApp dengan nomor 0852-1065-3087 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Tahun 2021,

Himawan Arief Sugoto



Lampiran Pengumuman

Nomor : 2861/Peng-100.KP.03.01/XI/2021

Tanggal : 12 November 2021

KISI-KISI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1625/M.SM.01.00/2021 tanggal 10 November 2021

No.	Jabatan	Materi
1.	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemampuan Umum - Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional - Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analisis SDM Aparatur Kemampuan Khusus - Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara - Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik - Kerangka kerja dan implementasi <i>Human Capital Management</i> di sektor publik - Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik - Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik - Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik - Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik - Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik - Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik
2.	Ahli Pertama - Assessor SDM Aparatur	Kemampuan Umum - Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara - Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur Kemampuan Khusus - Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi - Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta - Proses asesmen dan pengelolaan kompetensi/potensi Aparatur Sipil Negara - Kerangka kerja monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen

No.	Jabatan	Materi
3.	Ahli Pertama - Auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP - Bidang Strategi Pengawasan: kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern - Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut - Bidang Sikap Profesional: kode etik, pedoman perilaku, standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik, sikap profesional - Bidang Komunikasi: standar komunikasi audit intern - Bidang Lingkungan Pemerintahan: administrasi pemerintahan, pemerintahan daerah, pemberantasan tindak pidana korupsi, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara - Bidang Manajemen Pengawasan: pengelolaan fungsi audit internal
4.	Ahli Pertama - Penata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Umum - Teknik Penataan Ruang Kemampuan Khusus - Teknik merancang desain survei, pengolahan, dan analisis data level 1 - Teknik merancang struktur ruang dan pola ruang level 1 - Teknik pemetaan dan sistem informasi geografis (sig) dalam penata ruang level 1 - Teknik merancang strategi implementasi rencana tata ruang level 1 - Teknik penyusunan sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang level 1 - Pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang level 1 - Evaluasi substansi rencana umum dan rencana rinci tata ruang provinsi/ kabupaten/kota level 1
5.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi Umum - Ruang lingkup humas - Etika kehumasan Kompetensi Khusus - Manajemen isu - Manajemen komunikasi - Karakteristik media - Media <i>online</i>

No.	Jabatan	Materi
		<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi massa - Publisitas - Penulisan kehumasan - Kegiatan-kegiatan PR - Komunikasi organisasi - Komunikasi interpersonal - Teori komunikasi - Model komunikasi - Metode penelitian komunikasi - Audit komunikasi
6.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep dasar manajemen layanan TI - Manajemen katalog dan operasional layanan TI - Konsep dan desain basis data - Implementasi basis data - Konsep dasar dan cakupan audit TI - Rancangan sistem jaringan komputer - Implementasi sistem jaringan komputer - Pengembangan sistem jaringan komputer - Komponen dan fungsi infrastruktur TI - Instalasi komponen infrastruktur TI - Perbaikan dan pengembangan infrastruktur TI - Konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi - Konsep sistem informasi beserta implementasinya - Teknik pengolahan data - Konsep dan implementasi sistem informasi geografis - Multimedia - Konsep dan implementasi multimedia
7.	Terampil- Auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP - Bidang Strategi Pengawasan: kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern - Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut - Bidang Sikap Profesional: kode etik, pedoman perilaku, standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik, sikap profesional - Bidang Komunikasi: standar komunikasi audit intern - Bidang Lingkungan Pemerintahan: administrasi pemerintahan, pemerintahan daerah, pemberantasan tindak pidana korupsi, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

No.	Jabatan	Materi
		- Bidang Manajemen Pengawasan: pengelolaan fungsi audit internal
8.	Analisis Hukum Pertanahan	Kompetensi Umum - Dasar Pertanahan Kompetensi Khusus - Administrasi Pertanahan - Perumusan Kebijakan Bidang Agraria dan Tata Ruang - Mediasi - Penanganan Perkara Pertanahan - Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan - Pendaftaran Tanah - Penetapan Hak Tanah - Pengadaan Tanah
9.	Analisis Keuangan	Kemampuan Umum - Integritas dan Kerja Sama - Komunikasi dan Orientasi pada Hasil - Kode Etik Pegawai - Pengambilan Keputusan - Sosial Kultur - Mengelola Perubahan - Pelayanan Publik dan Pengembangan Diri Kemampuan Khusus - Nota Keuangan Buku II atas UU APBN Tahun 2019 Nomor 18 Tahun 2018 - UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UUD 1945 - UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
10.	Analisis Organisasi	Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Pengembangan Organisasi - Perencanaan Strategis
11.	Analisis Pertanahan	Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Konsolidasi Tanah - Landreform - Penatagunaan Tanah - Pengaturan Pertanahan - Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jabatan	Materi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pemantauan Tanah - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang - Pengendalian Pertanahan - Penilaian Tanah
12.	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Pemetaan - Pengukuran Bidang Tanah - Survei Pertanahan
13.	Pengelola Informasi Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan - Pengelolaan Komunikasi Publik dan <i>Media Center</i>
14.	Pengelola Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Konsolidasi Tanah - Landreform - Penatagunaan Tanah - Pengaturan Pertanahan - Pemberdayaan Masyarakat - Pembinaan dan Pemantauan Tanah - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang - Pengendalian Pertanahan - Penilaian Tanah
15.	Pengolah Data Yuridis Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Administrasi Pertanahan - Perumusan Kebijakan Bidang Agraria dan Tata Ruang - Mediasi - Penanganan Perkara Pertanahan - Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan - Pendaftaran Tanah - Penetapan Hak Tanah - Pengadaan Tanah
16.	Verifikator Berkas Permohonan Hak	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Administrasi Pertanahan - Perumusan Kebijakan Bidang Agraria dan Tata Ruang - Pendaftaran Tanah - Penetapan Hak Tanah

No.	Jabatan	Materi
17.	Petugas Ukur	Kemampuan Umum - Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus - Pemetaan - Pengukuran Bidang Tanah - Survei Pertanahan